

Kucurkan Hibah Rp 5,9 Miliar untuk Kepemudaan, Pj Bupati HSS Ingatkan Jangan Ada Kegiatan Fiktif



Ketua National Paralympic Committee (NPC) HSS menerima secara simbolis dana hibah Rp 1 miliar dari Pemkab HSS yang diserahkan Pj Bupati HSS, Selasa (28/5/2024). Dana hibah tersebut untuk kegiatan organisasi-organisasi penerima untuk menjalankan program masing-masing.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ketua-NPC-HSS-menerima-secara-simbolis-dana-hibah-Rp-1-miliar-dari-Pemkab-HSS.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyalurkan dana hibah sebesar Rp 5.950.000.000 untuk organisasi kepemudaan dan keolahragaan, Selasa (28/5/2024).

Sebelum diserahkan secara simbolis, dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Heri Utomo dengan para penerima.

Penandatanganan disaksikan Pj Bupati HSS H Hermasnyah di Aula Rakat Mufakat Kantor Sekretariat Daerah HSS kemudian diserahkan secara simbolis kepada masing-masing ketua organisasi penerima yang menandatangani.

Kadisporapar HSS Heri Utomo, menjelaskan, organisasi yang menerima hibah kali ini adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 250 juta.

Selanjutnya, Kwarcab Pramuka HSS, Rp 500 juta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) HSS Rp 3,5 miliar. National Paralympic Committee (NPC) HSS 1 miliar dan

Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) HSS sebesar Rp 700 juta. Dana tersebut bersumber dari APBD HSS 2024.

Penjabat Bupati HSS Hermasyah menjelaskan, pemberian dana hibah bertujuan untuk meningkatkan peranan dan prestasi organisasi. Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Pemkab HSS atas pembinaan berkesinambungan masing-masing organisasi.

"Jadi manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan roda organisasi sesuai program yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Hermasyah pun mengingatkan, penggunaan dana hibah sangat berisiko hukum, jika tak digunakan sesuai peruntukannya.

Untuk itu, dia pun meminta agar dana dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, dan meminta Kepala Disporapar agar selalu aktif memonitor kegiatan masing-masing organisasi atas penggunaan dana hibah ini.

"Jangan ada penggunaan diluar apa yang telah ditetapkan organisasi. Jangan sampai ada kegiatan fiktif. Karena jika penggunaannya tak sesuai program yang telah dibuat, pemberi maupun penerima juga bermasalah dan ikut bertanggungjawab," kata Hermansyah.

Untuk itu, jika ada perubahan program dalam perjalanannya, diminta untuk mengonsultasikannya dengan Inspektorat selaku pengawas, sehingga, kata Hermansyah bisa dilakukan perubahan atau revisi NPHD-nya. untkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, menyerahkan dana hibah kepada organisasi keagamaan, pondok pesantren, majelis talim, mesjid dan langgar atau mushalla, Rabu (13/4/2022).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab HSS, H Fajar Abdi, total dana hibah yang diserahkan untuk tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp 5,2 miliar.

Rinciannya, tiga lembaga organisasi keagamaan, enam masjid, 12 langgar atau musholla, empat pondok pesantren dan satu majelis taklim.

Dikatakannya, dana hibah ini diserahkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan.

Terutama untuk peningkatan kualitas dan sarana prasarana tempat ibadah di HSS. Sehingga tercipta kenyamanan beribadah dan menuntut ilmu bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat HSS yang agamis.

Bupati HSS, Drs H Achmad Fikry mengatakan, dana hibah yang diserahkan hari ini mungkin belum sesuai dengan harapan atau keperluan lembaga, mesjid dan penerima hibah lainnya. Namun ini sudah di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan ini, sifatnya hanya untuk memancing swadaya masyarakat. Dengan sumbangan di jalan untuk mengumpulkan dana atau dengan cara lainnya. Karena pemerintah tidak bisa membantu keseluruhan kebutuhan yang di perlukan.

Ia juga menyatakan pemerintah daerah akan terus membantu kegiatan di pondok pesantren, masjid dan langgar. Termasuk melanjutkan program pembayaran tagihan listrik untuk semua langgar atau musala.

Ia berharap, penerima segera melaksanakan dan menggunakan dana hibah yang diberikan sesuai kebutuhannya.

"Yang harus diingat pula agar secepatnya memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar laporan yang ada di pemerintah HSS," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/28/kucurkan-hibah-rp-59-miliar-untuk-kepemudaan-pj-bupati-hss-ingatkan-jangan-ada-kegiatan-fiktif>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/13/bupati-hss-serahkan-dana-hibah-sebesar-rp-52-miliar-untuk-organisasi-keagamaan>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) *Angka (3)* partai politik dan/atau

(d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;

b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

